



# LKJIP 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP  
KABUPATEN BULELENG**

*Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja  
Telp/Fax: (0362) 22063  
email: [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan yang memberikan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Laporan ini juga disusun sebagai syarat evaluasi dan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada rencana strategis SKPD, selama tahun anggaran berjalan. Sehingga dapat dilihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2017. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng,



**I Putu Karuna, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19660602 199403 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Perencanaan Strategis .....	16
2.2. Indikator Penetapan Kinerja .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.2. Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV PENUTUP.....	36
LAMPIRAN .....	23



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan .....	4
Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan .....	4
Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 .....	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Tahun 2017 .....	23
Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2017 .....	25
Tabel 3.2 Data Realisasi Investasi Tahun 2012-2017 .....	25
Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017 Berdasarkan Lapangan Usaha.....	26
Tabel 3.4 Data IKM .....	27
Tabel 3.5 Penilaian terhadap Unsur Pelayanan .....	28
Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2017 .....	29
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017.....	32
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017.....	32

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP .....	6
Gambar 1.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan .....	11
Gambar 1.3 Alur/Skema Pengaduan .....	12



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2017 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus



didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

### **1.3.1. Kondisi Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipimpin oleh



Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### **1.3.2. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

### **1.3.3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **1.3.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
  - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
  - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal

- b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
  - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
  - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
  - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
  - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
  - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2017 berjumlah 89 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 34 orang, Honor Daerah 2 orang, dan Tenaga Kontrak 53 orang. Data PNS diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
3	Pengatur (II/c)	2	2	4
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
5	Penata Muda (III/a)	3	2	5
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	2	6
7	Penata (III/c)	2	1	3
8	Penata Tk. I (III/d)	5	2	7
9	Pembina (IV/a)	2	1	3
10	Pembina Tk. I (IV/b)	2	-	2
11	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
<b>TOTAL :</b>		<b>22</b>	<b>12</b>	<b>34</b>

2) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	1	6
3	Eselon IV	7	5	12
4	Staf	9	6	15
<b>TOTAL :</b>		<b>22</b>	<b>12</b>	<b>34</b>

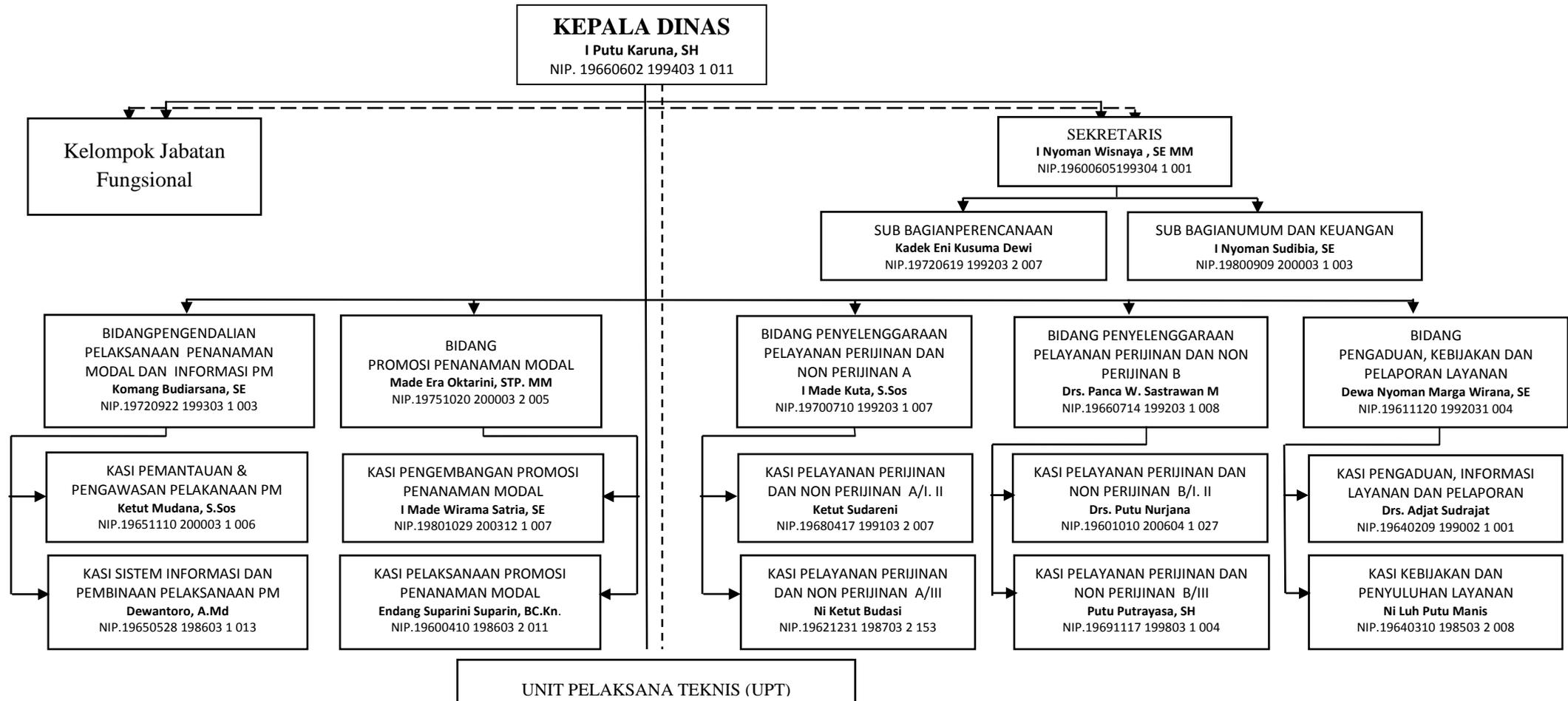
## 3) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	2	2	-	-	10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	4	-	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	2	-	1	-	-	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	2	-	5	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	4	-	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	1	-	-	4
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada gambar berikut.

Nomor : 75 Tahun 2016  
 Tanggal : 28 Desember 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



### 1.3.5. Kondisi Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal. Jumlah izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan PPSTP juga menjadi bertambah, dari yang awalnya menangani 33 (tiga puluh tiga) jenis izin, sekarang menjadi menangani 42 (empat puluh dua) jenis izin terbagi menjadi 13 (tiga belas) izin bidang A dan 29 (dua puluh sembilan) izin bidang B.

#### a. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

Izin yang berbayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Pajak Reklame
2. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Izin Gangguan ( HO )
5. Izin Usaha Perikanan ( IUP )

Sedangkan izin yang tidak berbayar terdiri dari :

6. Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK )
7. Izin Lokasi
8. Izin Prinsip adalah Pemberian Izin untuk mendirikan bangunan;
9. Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
12. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
13. Izin Prinsip Persetujuan Penanaman Modal;

#### b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

Izin yang berbayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Izin Trayek

Izin yang tidak berbayar terdiri dari 28 izin yaitu:

2. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)
3. Izin Usaha Industri ( IUI )
4. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
5. Izin Penyediaan Daging
6. Izin Pemotongan Hewan
7. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok.
8. Izin Penyosohan Beras
9. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak
10. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat
11. Legalisir Izin Perndirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
12. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
14. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
15. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
16. TDUP Usaha Perjalanan Wisata
17. TDUP Penyediaan Jasa Akomodasi
18. TDUP Jasa Makanan dan Minuman
19. TDUP Kawasan Pariwisata
20. TDUP Jasa Transportasi Wisata
21. TDUP Daya Tarik Wisata
22. TDUP Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
23. TDUP Jasa Pramuwisata
24. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
26. TDUP Jasa Informasi Pariwisata
27. TDUP Wisata Tirta
28. TDUP SPA
29. Izin Kesehatan

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin adalah sebagai berikut.

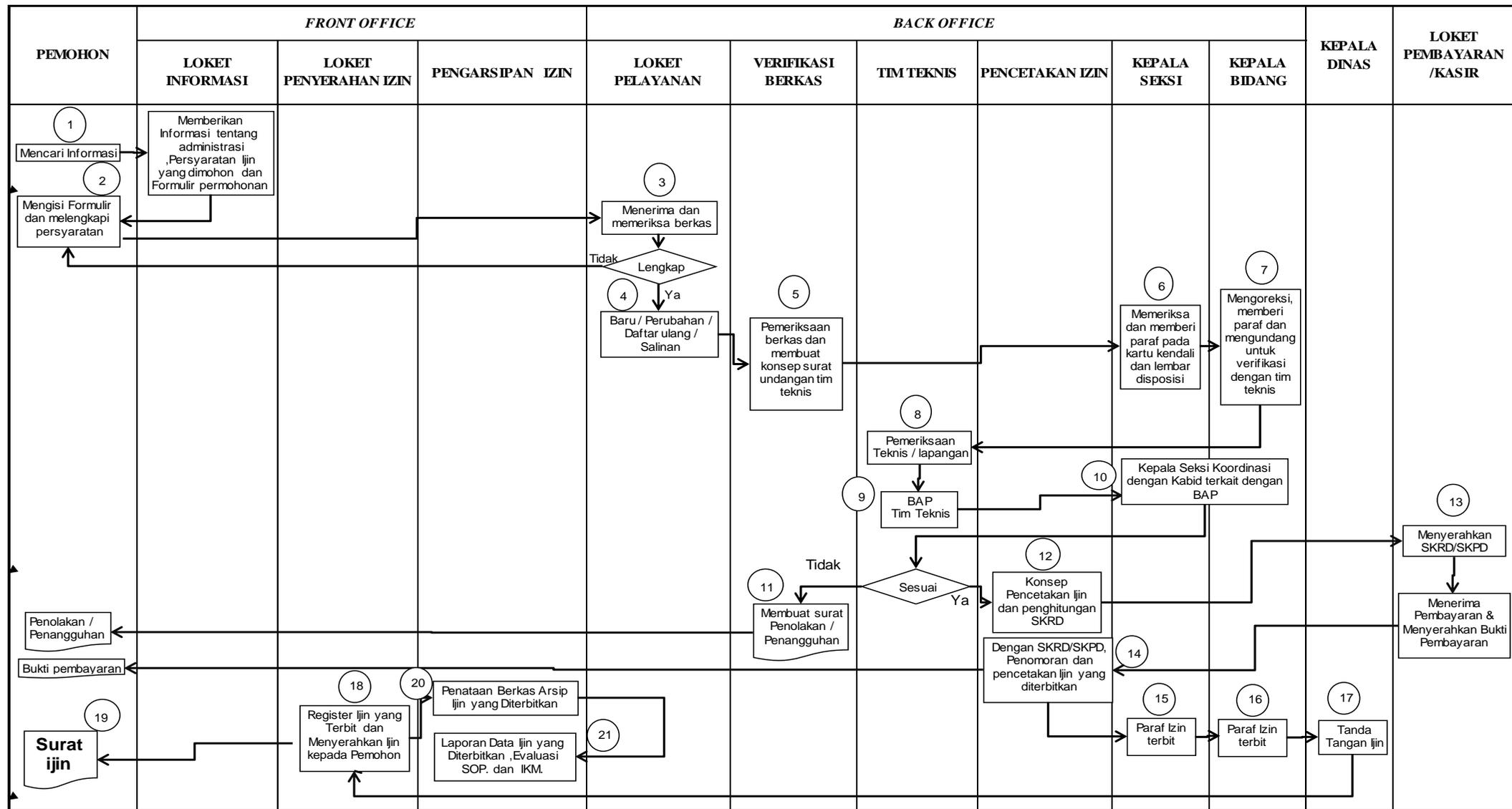
1. Pemohon mencari informasi pada Loker Informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran;

2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan atau memasukkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan A/B;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas verifikasi mengecek apakah termasuk permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan;
5. Petugas verifikasi berkas melakukan pemeriksaan teknis terhadap berkas-berkas tersebut dan membuat surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan;
6. Kepala Seksi memeriksa dan memberi paraf lembar disposisi permohonan yang lengkap untuk diajukan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B untuk memohon tindak lanjut;
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B menganalisa berkas dan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan Verifikasi lapangan;
8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan
9. Tim Teknis membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan BAP kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B;
10. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan A/B berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B membuat surat penolakan jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR dan Peraturan lainnya), kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
11. Petugas verifikasi berkas membuat surat penolakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
12. Jika hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai maka permohonan perizinan disetujui berdasarkan BAP oleh Tim Teknis, petugas akan mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loket Pembayaran dan Kasir;
13. Setelah pemohon menyerahkan SKRD/SKPD dan melakukan pembayaran pada loket pembayaran/kasir maka pemohon akan diberikan bukti pembayaran.
14. Berdasarkan SKRD/SKPD, petugas pencetakan izin akan melakukan penomoran dan pencetakan izin,;
15. Selanjutnya izin yang sudah dicetak dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Seksi

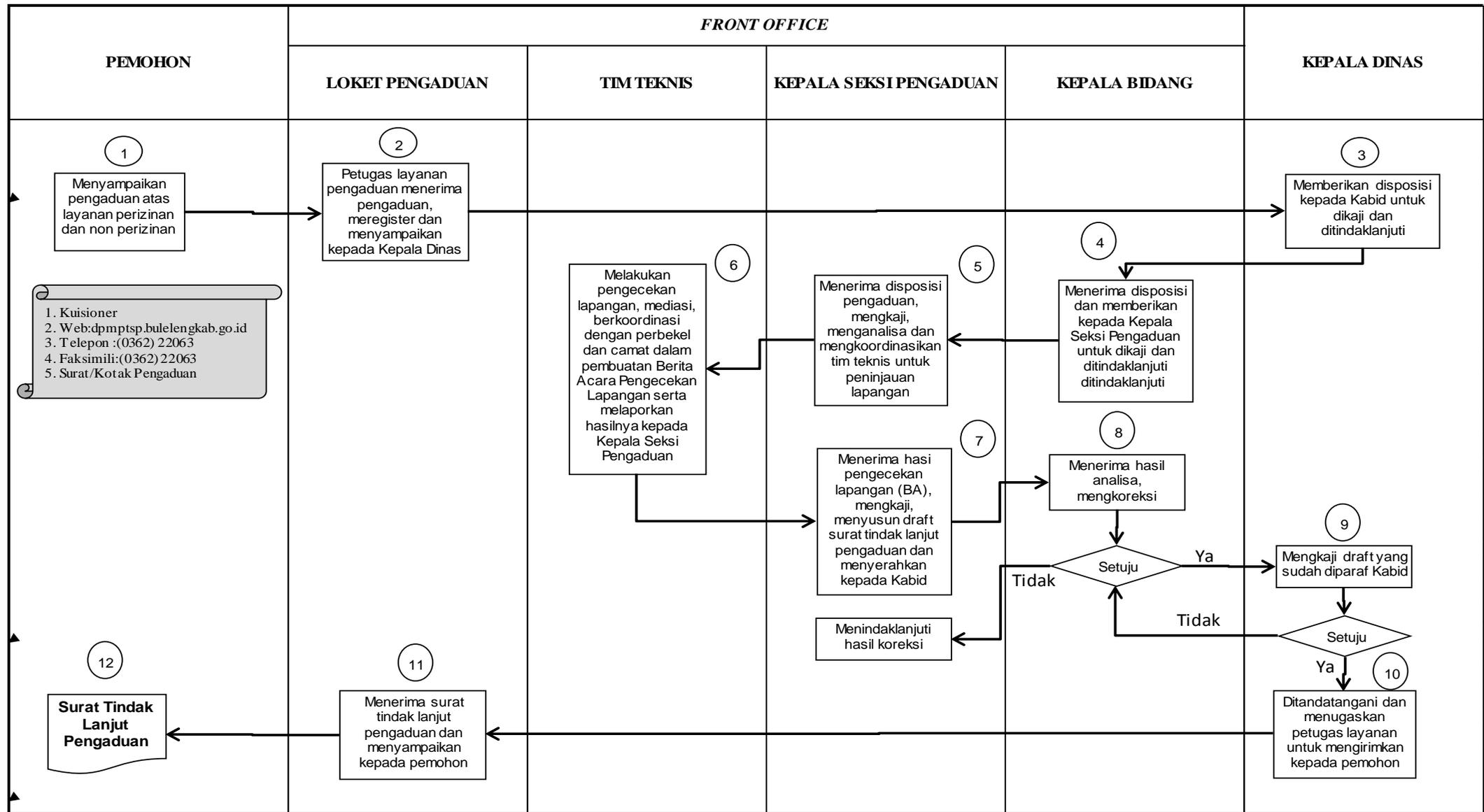
16. Izin yang sudah dicetak juga dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B
17. Setelah paraf dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang lengkap baru izin diajukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk ditandatangani;
18. Loker Penyerahan Izin pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan akan meregister izin yang terbit dan menyerahkan kepada pemohon;
19. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
20. Semua jenis perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai bagian dari Dokumen Negara;
21. Laporan data izin yang diterbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Gambar 1.2 berikut adalah alur/skema pengurusan permohonan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.





Gambar 1.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.3 Alur/Skema Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

## 1.4. Isu Strategis

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1.4.1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Sudah adanya *masterplan* wilayah dalam kaitannya dengan penentuan titik pemasangan papan reklame;
- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
  - 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 2) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan terutama sarana dan prasarana gedung kantor dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

### 1.4.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

#### 1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.



- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Namun demikian, sebelum diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, terlebih dahulu diuraikan perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena perjanjian kinerja mengacu kepada RPJMD dan bertujuan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal agar pelaksanaan kegiatannya dapat sejalan dengan RPJMD dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat diukur dengan jelas.

##### 2.1.1 Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,  
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN  
TRI HITA KARANA**

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

3. **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

### 2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-4 yaitu “*Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan*”.

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan*” melalui tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat dan investor;
- b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng adalah “*Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan*” melalui :

1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pengendalian pembangunan.

#### 2.1.5 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan profil potensi investasi melalui musrenbang;
2. Pengembangan potensi media lokal sebagai sarana potensi investasi;
3. Pengembangan pengawasan investasi terpadu dan sinergis;
4. Pembinaan kelompok kesesuaian lokal sebagai sarana potensi investasi dengan peningkatan kemitraan usaha berbasis masyarakat.

#### 2.1.6 Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

1. Pengkajian kawasan potensial pengembangan investasi sektor tertentu;
2. Penguatan daya dukung dan daya tampung investasi berbasis kearifan lokal;
3. Pengembangan sistem pengawasan online;
4. Fasilitasi pembentukan mode pengaduan melalui *call centre*;
5. Peningkatan kelembagaan pengawasan investasi berbasis masyarakat.

#### 2.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan terdiri dari program dan kegiatan penunjang dan urusan wajib.

##### 1) Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan yaitu :



- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 kegiatan yaitu:
- a. Pembangunan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
  - h. Penataan Halaman Gedung /Lingkungan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
  - c. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Anggaran SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
    - a. Penyusunan Anggaran SKPD
  7. Program Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
    - a. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
  - a. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
  - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
  - c. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
  - d. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
  - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
  - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
  - d. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
10. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
  - a. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi
11. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
  - a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
  - b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
  - c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
  - d. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan

- e. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Pariwisata dan Badan Usaha

## 2.2. Indikator Penetapan Kinerja

### 2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mengalami perubahan pada tahun 2017, di mana sebelumnya pada tahun 2016 IKU masih berbentuk Badan yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki 3 IKU yaitu, Penyelesaian Penerbitan IMB<14 Hari, Nilai IKM dan % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan. Namun seiring dengan pelimpahan wewenang penanaman modal maka IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2017 adalah sebagai berikut seperti tersaji pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Target 2017	Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	Prosentase	Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Perka BKPM nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan tata cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK	$\left( \frac{EndingValue}{BeginningValue} \right)^{\left( \frac{1}{\#ofyear} \right)} - 1$	BPS, DPMPPTSP dan BI	64 %	Realisasi Investasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	Angka/ Nilai	Sesuai PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.25/2009 ttg Pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPPTSP	80.50	Nilai tertinggi dari hasil survey

### 2.2.1. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Strategis DPMPPTSP dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	64	Prosentase
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	80,50	Angka/Nilai

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

#### **3.1.1. Capaian Indikator Kinerja**

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

#### **Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi dan Nilai Jual Potensi Investasi Daerah**

Indikator Kinerja Utama

##### **1. Laju Pertumbuhan Investasi Daerah**

###### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2017**

Target investasi pada tahun 2017 adalah Rp. 1.050.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah), dan realisasinya adalah 1.092.662.246.708 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Empat

Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau sekitar 104 %.

Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2017

Triwulan	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
I	Rp. 109.759.698.365	1.616
II	Rp. 248.680.378.313	567
III	Rp. 415.437.980.000	947
IV	Rp. 318.784.190.030	633
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.092.662.246.708</b>	<b>3.763</b>

Namun jika dihitung laju pertumbuhan investasi daerah melibatkan target dan realisasi dari tahun 2012-2017 dari 64% dapat tercapai sebesar 49,91% dengan tingkat capaian 77,98%. Nilai ini diperoleh dari formulasi/cara pengukuran *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sesuai yang tercantum pada IKU yang dihitung dari realisasi investasi mulai dari tahun 2012-2017.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng baru menangani urusan penanaman modal pada tahun 2017 sehingga data investasi dari tahun 2012-2016 diperoleh dari Ekbang yang sebelumnya menangani urusan penanaman modal.

Tabel 3.2 Data Realisasi Investasi Tahun 2012-2017

Tahun ke	Tahun	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
0	2012	Rp. 144.316.539.250	1.430
1	2013	Rp. 75.505.000.000	435
2	2014	Rp. 263.125.478.000	1.337
3	2015	Rp. 10.042.866.236.716	1.852
4	2016	Rp. 1.041.870.243.000	1.215
5	2017	Rp. 1.092.662.246.708	3.763
<b>CAGR</b>		<b>49,91 %</b>	

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Perencanaan Jangka Menengah.

Rencana kinerja jangka menengah adalah 64 %. Target pada tahun 2017 adalah 64 % dapat tercapai sebesar 49,91% sehingga tingkat capaian kinerja ntuk indikator Laju Pertumbuhan Investasi Daerah adalah sebesar 77.98%.

- d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

- e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2017

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.050.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah), dan realisasinya adalah 1.092.662.246.708 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau sekitar 104 %.

Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Real Estate	468.279.560.000,00	43
2	Perdagangan Besar	20.000.000.000,00	2
3	Jasa Pendidikan	46.892.500.000,00	4
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.251.000.000,00	26
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102.450.000.000,00	9
6	Minimarket	53.486.222.222,00	5
7	Industri Pengolahan	45.799.220.000,00	4
8	Informasi dan Komunikasi	9.183.744.486,00	1
9	Transportasi dan Pergudangan	29.870.000.000,00	3
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.450.000.000,00	3
<b>TOTAL</b>		<b>1.092.662.246.708,00</b>	<b>100</b>

Sumber data: [dpmpstsp.bulelengkab.go.id/profil/data-bidang-dalak-info-pm-35](http://dpmpstsp.bulelengkab.go.id/profil/data-bidang-dalak-info-pm-35)

Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 disebabkan karena terjadi peningkatan investasi pada lapangan usaha Rel Estate dengan nilai investasi sebesar Rp. 468.279.560,00 atau sebesar 43% dari total investasi yang masuk. Peningkatan investasi paa sector real estate didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah sederhana melalui program rumah bersubsidi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program bidang penanaman modal yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,16% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 668.587.506,00 dari anggaran sebesar Rp. 683.320.000,00. Program kedua yaitu Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,26% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 104.588.462,00 dari anggaran sebesar Rp. 107.000.000,00 serta program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,59% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 501.861.593,00 dari anggaran sebesar Rp. 515.200.000,00.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Program/kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, Kajian Kebijakan Penanaman Modal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal, dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman



Modal, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi dan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. Dari program dan kegiatan tersebut yang mendukung keberhasilan capaian kinerja karena hampir semua kegiatan terealisasi lebih dari 90%.

Kesimpulan Sasaran 1 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 dari Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Investasi Daerah sebesar 77,98% berada di rentang 70 s/d <85 sehingga masuk dalam kategori BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Investasi Daerah juga masuk dalam kategori BERHASIL.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator Kinerja Utama

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2017  
Target Nilai IKM pada tahun 2017 adalah 80,50 yang terealisasi adalah 80,60 atau sekitar 100,12% yang melibatkan 200 pemohon sebagai responden dilakukan selama 2 (dua) semester yaitu semester I dan semester II.
  - b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Data IKM

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai IKM	Nilai/ Angka	80.00	80.25	80.25	80.26	80.50	80.60

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Perencanaan Jangka Menengah  
Kondisi akhir Nilai IKM pada target RPJMD 2012-2017 adalah 80,50, dan sudah terealisasi sebesar 80,60. Detail perbandingan realisasi IKM pada tahun 2017 dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah seperti yang terlampir pada Lampiran 1.
- d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja nilai IKM mencapai 100,12%, di mana realisasinya adalah 80,60 yang diperoleh dari penilaian oleh pemohon sebagai responden terhadap beberapa unsur pelayanan dalam mengurus ijin. Penilaian yang dilakukan menunjukkan kinerja “Sangat Baik” atas unsur pelayanan “penanganan pengaduan, saran dan masukan”. Penilaian kinerja “Baik” dengan nilai paling rendah terhadap unsur pelayanan “sarana dan prasarana” sehingga perlu adanya perbaikan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Berikut ini adalah rincian penilaian terhadap unsur pelayanan.

Tabel 3.5 Penilaian terhadap Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR TTBG	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Persyaratan	3,3100	0,3677	B	BAIK
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,0800	0,3422	B	BAIK
3	Waktu Penyelesaian	3,1000	0,3444	B	BAIK
4	Biaya / Tarif	3,3200	0,3689	B	BAIK
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,1400	0,3489	B	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	3,1700	0,3522	B	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	3,1300	0,3477	B	BAIK
8	Sarana dan Prasarana	3,0200	0,3355	B	BAIK
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,7500	0,4166	A	SANGAT BAIK
<b>JUMLAH</b>			<b>3,2241</b>		
<b>IKM : 3.22 X 25</b>			<b>80,60</b>	B	BAIK

Sumber data: Laporan IKM Semester II Tahun 2017 DPMPTSP

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mampu diefisiensi penggunaan anggarannya sebesar 1.8% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 848.782.324,00 dari anggaran sebesar Rp. 864.300.000,00.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan ini didukung oleh Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan, tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai 80,60.

## Kesimpulan Sasaran 2 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 dari Indikator Kinerja Utama Nilai IKM sebesar 100.12%. karena angka capaian kinerja mencalai lebih dari 100% maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Nilai IKM di mana target RPJMD 2012-2017 adalah 80,50 dan pada akhir RPJMD sudah terealisasi 80,60 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

### 3.1.2. Capaian Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 13 (tigabelas) kegiatan realisasi capaian fisiknya rata-rata sebesar 121,54 %, di mana pada umumnya serapan anggaran kegiatan telah mencapai 97,49 %. Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik sebanyak 3.803 Exemplar dari target yang ditentukan 1.000 exemplar atau sekitar 380%, hal ini dikarenakan jumlah surat keluar masuk yang tidak bisa diprediksi. Ada 2 (dua) kegiatan yang realisasinya kurang dari 80%. Kegiatan pertama adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik saja yang realisasinya keuangannya 77,50%, tolak ukur pengeluaran/belanja berdasarkan kebutuhan penggunaan tiap bulannya yang tidak bisa diprediksi. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kami mampu berhemat atas penggunaan dari ketiga sarana tersebut terutama dari penggunaan Telepon dari target Rp. 5.000.000 hanya terpakai sebesar Rp.3.212.943 atau sebesar 64,25%. Anggaran yang dialokasikan tidak semuanya harus terpakai, di mana untuk komponen penggunaan Air kami juga mampu menekan penggunaan air sehingga terjadi efisiensi seperti pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2017

Jenis Pembayaran	Tahun 2017			
	Target	Realisasi	%	Jumlah Pemakaian
Listrik (2 Rekening)				
- 551600002667	32.900.000	23.744.855	72.17	1.519.300 Kwh
- 551600115505				368.900 Kwh
Air	5.000.000	4.468.520	89.37	800 M <sup>3</sup>

Sedangkan untuk pemakaian belanja kawat/faksimili/internet kami mampu berhemat dari target Rp. 3.500.000 terealisasi sebesar Rp.2.635.976 atau 75.31%. Kegiatan kedua adalah kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang realisasi serapan anggarannya Rp.14.172.131 dari target Rp. 18.200.000 atau sebesar 77,86%. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk belanja fotocopy dan belanja cetak yaitu cetak lembar disposisi, formulir lembar surat pengantar, amplop dinas, kartu ucapan hari raya, kartu surat masuk, kartu surat keluar, blanko SPMNCR warna, dan spanduk hari-hari besar.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 79,13% sedangkan untuk serapan anggaran yaitu 80,25%. Namun pada program ini hanya bisa terlaksana 7 (tujuh) kegiatan saja karena 1 (satu) kegiatan yaitu Pembangunan Gedung Kantor tidak terealisasi karena belanja modal DED pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor mengalami gagal lelang di ULP, namun sudah bersurat kepada Badan Keuangan Daerah dan Bappeda agar dimunculkan pada anggaran perubahan tahun 2018.
3. Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, serta Bimbingan Rohani dan Budaya Aparatur. Dari ketiga kegiatan tersebut capaian kinerjanya sudah mencapai 100% dan dari serapan anggaran sudah mencapai 99,99%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sumber Daya Aparatur, capaian realisasi fisiknya adalah 100% dan dari serapan anggaran juga sudah mencapai 100%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi fisiknya mencapai 100% dan serapan anggarannya mencapai 98,90%.
6. Capaian Kinerja pada Program Penyusunan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99,68%.
7. Program Informasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan, telah mampu direalisasi sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99,97%.
8. Ada 3 (tiga) program terkait dengan penanaman modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan



Prasarana Daerah. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,41%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 4 kali atau sekitar 400%. Hal ini dikarenakan urusan di bidang penanaman modal baru dilimpahkan pada tahun 2017 sehingga target yang ditentukan hanya *matchmaking* lokal (1 kali) namun pada kenyataannya terdapat undangan dari provinsi dengan jumlah anggaran yang masih mencukup sehingga terealisasi sebanyak 3 kali untuk tingkat provinsi. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari target 4 kali penyelenggaraan promosi mampu terealisasi 7 kali atau sekitar 175%, hal ini dikarenakan jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang tidak dapat diprediksi baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan masih tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan promosi tersebut. Penyelenggaraan promosi yang dilakukan antara lain di Padang (1 kali), Kupang (1 kali), Denpasar (1 kali), pameran di Surabaya (2 kali), pameran di Buleleng (1 kali) dan pameran di Jakarta (1 kali). Sedangkan untuk kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 2 paket mampu terealisasi 7 paket atau sekitar 350%, hal ini dikarenakan kegiatan ini mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, di mana setiap penyelenggaraan promosi dengan serta merta adanya penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal. Realisasi yang melebihi target ini disebabkan karena program dan kegiatan bidang penanaman modal baru dilimpahkan pada tahun ini sehingga untuk penentuan target belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,84%. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,74%. Nilai investasi pada tahun 2017 adalah Rp. 1.092.662.246.708,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dari target 1.050.000.000.000 atau sekitar 104%.

9. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu, mencakup 5 (lima) kegiatan, pada dasarnya telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 103,80% dan serapan anggarannya 98,20%. Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan diperoleh angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menyebarkan



angket kepada 200 pemohon sebagai responden yaitu sebesar 80,60 dari target 80,50 yang dilakukan selama 2 (dua) semester yaitu semester I dan semester II. Untuk kegiatan Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan, kami mentarget sebanyak 3.000 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.636 ijin, atau sekitar 121%, hal ini dikarenakan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk, dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2017 terealisasi sebanyak 2.817 izin. Sedangkan untuk Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha, kami menetapkan target sebanyak 3.000 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 2.951 Ijin atau sekitar 98%. Sehingga jumlah total izin terbit adalah 6.587 Ijin dari target 6.000 ijin pada tahun 2017.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 4,60 % yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 4.520.812.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.313.131.379,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 3,50 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 3.175.605.375,00 terealisasi sebesar Rp 3.064.642.373,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.175.605.375</b>	<b>3.064.642.373</b>	<b>110.963.002</b>	<b>96.50</b>
	1. Belanja Pegawai	3.175.605.375	3.064.642.373	110.963.002	96.50
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.520.812.000</b>	<b>4.313.131.379</b>	<b>207.680.621</b>	<b>95.40</b>
	1. Belanja Pegawai	515.951.000	509.791.000	6.160.000	98.80
	2. Belanja Barang Jasa	3.443.986.000	3.366.004.979	77.981.021	97.73
	3. Belanja Modal	560.875.000	437.335.400	123.539.600	77.97
	<b>Total</b>	<b>4.520.812.000</b>	<b>4.313.131.379</b>	<b>207.680.621</b>	<b>95.40</b>

Sumber data :LRA DPMPTSP Kabupaten Buleleng TA. 2017

(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran program dan kegiatan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017

NO	KEGIATAN	BELANJA			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.403.552.000</b>	<b>1.368.353.364</b>	<b>35.198.636</b>	<b>97.49</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	39.319.000	681.000	98,29

NO	KEGIATAN	BELANJA			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	42.627.294	12.372.706 Tlp=1.787.057 Air=531.480 Listrik=9.155.145 Internet=864.024	77,50
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000	169.822.000	178.000	99,89
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.200.000	3.411.900	1.788.100 (Belanja STNK)	65,61
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	217.725.000	216.886.200	838.800	99,61
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98.500.000	98.480.730	19.270	99,98
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	224.992.000	222.551.525	2.440.475	98,91
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.200.000	14.172.131	4.027.869 Cetak= 1.748.989 Fc= 2.278.880	77,86
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.746.350	5.738.260	8.090	99,85
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	369.075.000	357.318.900	11.756.100	96,81
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	6.000.000	5.940.000	60.000	99,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.200.000	17.095.510	104.490	99,39
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	175.913.650	174.989.914	923.736	99,47
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>633.625.000</b>	<b>508.506.610</b>	<b>125.118.390</b>	<b>80.25</b>
14	Pembangunan Gedung Kantor	108.000.000	0	108.000.000 (DED)	0,00
15	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	67.500.000	63.751.500	3.748.500	94,44
16	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	76.000.000	73.934.420	2.065.580	97,28
17	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	58.000.000	55.430.720	2.569.280	95,57
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	6.125.000	5.549.970	575.030	90,61
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	10.000.000	7.524.000	2.476.000 (Belanja pemeliharaan Komputer)	75,24
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	208.000.000	203.316.000	4.684.000	97,74
21	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	100.000.000	99.000.000	1.000.000	99,00
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>88.825.000</b>	<b>88.823.300</b>	<b>1.700</b>	<b>99.99</b>
22	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7.700.000	7.700.000	0	100

NO	KEGIATAN	BELANJA			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
23	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	17.000.000	16.998.300	1.700	99,99
24	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	64.125.000	64.125.000	0	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	0	100
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>94.990.000</b>	<b>93.950.100</b>	<b>1.039.900</b>	<b>98.90</b>
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.000.000	56.010.700	989.300	98,26
27	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	37.990.000	37.939.400	50.600	99,86
<b>VI</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.682.710</b>	<b>317.290</b>	<b>99.68</b>
28	Penyusunan Anggaran SKPD	100.000.000	99.682.710	317.290	99,68
<b>VII</b>	<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.995.410</b>	<b>4.590</b>	<b>99.97</b>
29	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	20.000.000	19.995.410	4.590	99,97
<b>VII I</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>515.200.000</b>	<b>501.861.593</b>	<b>13.338.407</b>	<b>97.41</b>
30	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	87.500.000	86.940.118	559.882	99,36
31	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	200.700.000	188.253.550	12.446.450	93,79
32	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	121.260.000	121.176.590	83.410	99,93
33	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	105.740.000	105.491.335	248.665	99,76
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>683.320.000</b>	<b>668.587.506</b>	<b>14.732.494</b>	<b>97.84</b>
34	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	67.600.000	65.345.750	2.254.250	96,66
35	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	166.100.000	164.320.856	1.779.144	98,92
36	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	95.900.000	91.429.650	4.470.350	95,33
37	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	47.520.000	46.397.000	1.123.000	97,63
38	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	254.000.000	250.970.650	3.029.350	98,80
39	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	52.200.000	50.123.600	2.076.400	96,02

NO	KEGIATAN	BELANJA			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
<b>X</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>107.000.000</b>	<b>104.588.462</b>	<b>2.411.538</b>	<b>97,74</b>
40	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	107.000.000	104.588.462	2.411.538	97,74
<b>XI</b>	<b>Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	<b>864.300.000</b>	<b>848.782.324</b>	<b>15.517.676</b>	<b>98,20</b>
41	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	50.000.000	48.456.580	1.543.420	96,91
42	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	141.800.000	137.714.620	4.085.380	97,11
43	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	60.000.000	56.330.750	3.669.250	93,88
44	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	338.000.000	334.377.974	3.622.026	98,92
45	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	274.500.000	271.902.400	2.597.600	99,05
<b>TOTAL</b>		<b>4.520.812.000</b>	<b>4.313.131.379</b>	<b>207.680.621</b>	<b>95,40</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab IV Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng dapat di simpulkan secara umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2017 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2017. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

- 1) Penetapan anggaran perubahan yang melalui jalur prosedur yang panjang menyebabkan pelaksanaan beberapa program yang mengalami perubahan menjadi terhambat.
- 2) Masih adanya tumpang tindih terkait tupoksi dengan instansi/SKPD lain mengingat perubahan dari Badan ke Dinas dengan penambahan wewenang di bidang penanaman modal, pengawasan lapangan untuk izin prinsip masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih tupoksi, sehingga timbul permasalahan terkait dengan penerbitan izin.
- 3) Program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng masih terkendala oleh keterbatasan personil baik di bidang teknis maupun administrasi dan keuangan. Kapasitas staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2017 berjumlah 34 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 12 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 53 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 89 orang.
- 4) Kurangnya mobilitas darat dalam menunjang pelayanan perizinan terutama untuk survey lapangan dan kegiatan pada monitoring dan evaluasi penanaman modal.
- 5) Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan dan jumlah alokasi anggaran yang diperlukan.
- 6) Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor.
- 7) Berdasarkan analisa hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan, ada 3 unsur pelayanan yang diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu;

- a. Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Sarana dan Prasarana, dengan nilai 3,0200
- b. Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, dengan nilai 3,0800.
- c. Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1000.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses Penetapan Anggaran Perubahan, serta perlu dicermati dalam perencanaan awal sehingga tidak terjadi program/kegiatan yang tidak bisa direalisasikan tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan organisasi untuk meminimalkan tumpang tindih tupoksi;
3. Mengantisipasi permasalahan secara administratif adalah membuat rencana kerja kegiatan dengan lebih realitis dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dan waktu penyelesaiannya tepat waktu. Oleh karena itu perlu penghitungan dan penyesuaian kembali ukuran yang dipergunakan dalam Rencana Kerja maupun Renstra agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengukuran realisasi capaian indikator kinerja (*Outcome*).
4. Mengoptimalkan kapasitas personil yang ada walaupun harus ada yang merangkap dalam pelaksanaan tugas-tugas, serta memberi kesempatan kepada staf (administrasi keuangan maupun teknis) dalam menambah wawasan/pengetahuan melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun diklat-diklat berbasis informasi dan teknologi (IT) sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
5. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
6. Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
  - a. Upaya perbaikan dari unsur Sarana dan Prasarana yaitu melalui perbaikan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
  - b. Upaya perbaikan dari unsur Waktu Penyelesaian, yaitu melalui identifikasi hambatan-hambatan yang ada, baik di kantor maupun di lapangan, dan peningkatan pemahaman

petugas pelayanan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta pengawasan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada oleh petugas.

- c. Upaya perbaikan dari unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu melalui peninjauan kembali (perbaikan) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada yang telah ditetapkan, dan melalui pembuatan sistem antri yang jelas.

Akhirnya, kesimpulan kami terhadap pencapaian target indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017, khususnya untuk tahun anggaran 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan kami. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng,



**I Putu Karuna, SH**

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perbandingan Realisasi IKM 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Setiap Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Akumulatif 2013-2017)	Capaian Kinerja pada Akhir RPJMD
				2013		2014		2015		2016		2017			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/ Angka	-	79,00	80,23	80,00	79,75	80,00	80,25	80,25	80,26	80,50	80,60	80,50	80,60

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng,



**I Putu Karuna, SH.**

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2012-2017**

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	Prosentase	Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Perka BKPM nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan tata cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK	$\left( \frac{Ending\ Value}{Beginning\ Value} \right)^{\left( \frac{1}{\#of\ year} \right)} - 1$	BPS, DPMPPTSP dan BI	Realisasi Investasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	Angka/ Nilai	Sesuai PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.25/2009 ttg Pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPPTSP	Nilai tertinggi dari hasil survey

Singaraja, 14 Pebruari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng**I Putu Karuna, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19660602 199403 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

---

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU KARUNA, SH

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 11 Oktober 2017

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**PUTU AGUS SURADNYANA, ST**

**I PUTU KARUNA, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19660602 199403 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**  
**PINTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	64	Prosentase
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	80,50	Angka/Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 683.320.000,00	APBD
2	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Rp 107.000.000,00	APBD
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 515.200.000,00	APBD
4	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 864.300.000,00	APBD

Singaraja, 11 Oktober 2017

Bupati Buleleng,

**PUTU AGUS SURADNYANA, ST**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng,



**I PUTU KARUNA, SH**

Pembina Tk.I

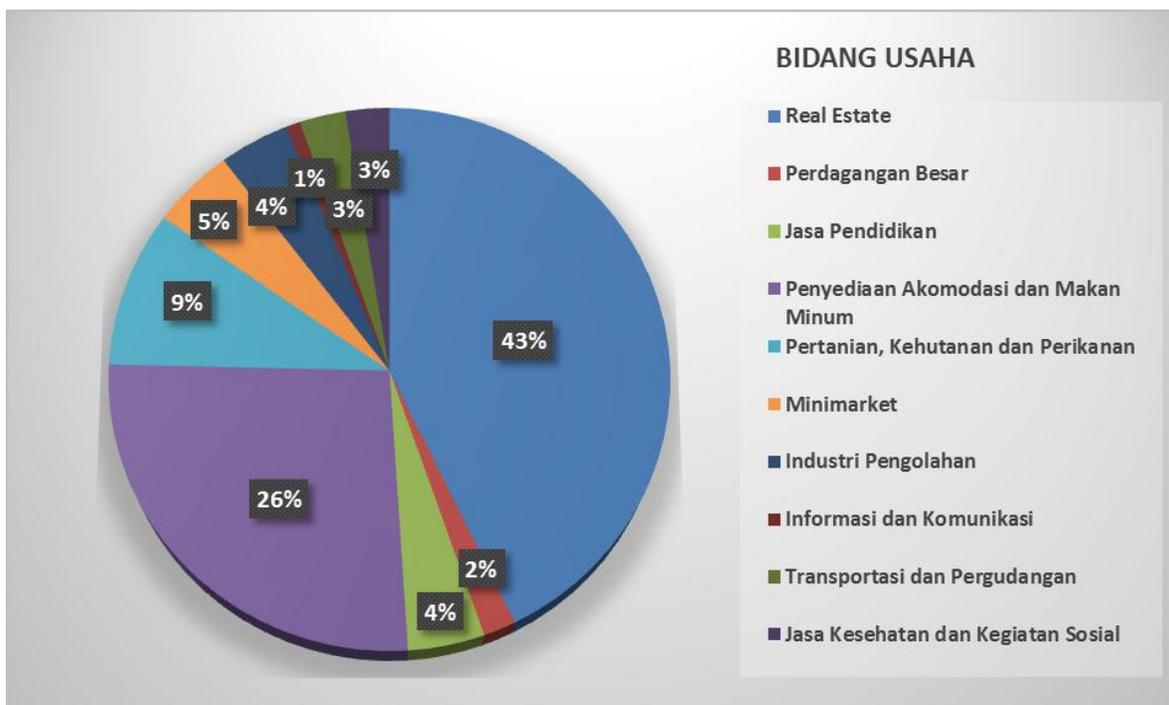
NIP. 19660602 199403 1 011

Lampiran 4. Realisasi Investasi Tahun 2017

**DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017**

	Lapangan Usaha	Jumlah (Rp)	%
1	Real Estate	468.279.560.000	43
2	Perdagangan Besar	20.000.000.000	2
3	Jasa Pendidikan	46.892.500.000	4
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.251.000.000	26
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102.450.000.000	9
6	Minimarket	53.486.222.222	5
7	Industri Pengolahan	45.799.220.000	4
8	Informasi dan Komunikasi	9.183.744.486	1
9	Transportasi dan Pergudangan	29.870.000.000	3
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.450.000.000	3
<b>Total</b>		<b>1.092.662.246.708</b>	<b>100</b>

**GRAFIK DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017**



## PERTUMBUHAN INVESTASI KABUPATEN BULELENG

$$\text{CAGR} = \left( \frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left( \frac{1}{\# \text{ of years}} \right)} - 1$$

Tahun ke	Tahun	Investasi
0	2012	144.316.539.250
1	2013	75.505.000.000
2	2014	263.125.478.000
3	2015	10.042.866.236.716
4	2016	1.041.870.243.000
5	2017	1.092.662.246.708
<b>CAGR</b>		<b>49,91%</b>

<b>INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</b>	
<b>KABUPATEN BULELENG</b>	
<b>SEMESTER I TAHUN 2017</b>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>NAMA LAYANAN :</b>
<b>80,59</b>	<b>RESPONDEN</b>
<b>(BAIK)</b>	JUMLAH : 100 Orang
	Periode Survey ( Januari 2017 – Juni 2017)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

<b>INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</b>	
<b>KABUPATEN BULELENG</b>	
<b>SEMESTER II TAHUN 2017</b>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>NAMA LAYANAN :</b>
<b>80,60</b>	<b>RESPONDEN</b>
<b>(BAIK)</b>	JUMLAH : 100 Orang
	JENIS KELAMIN : L = 60 Orang P = 40 Orang
	PENDIDIKAN : SD = 1
	SMP = 3
	SMA = 44
	D III = 49
	S 1 = 3
	S 2 = -
	Periode Survey ( 20 - 11 - 2017 s/d 10 - 12 - 2017)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

Lampiran 6. Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.0101.	Program Pelayanan Administrasi	1 Input (masukan)						
	Perkantoran	Dana	Rp	40.000.000	49.319.000	98		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0101.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Pengiriman Surat Menyurat	surat	1000	3.803	380		
		3 Out Come (hasil)						
		Terpenuhinya Jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						193		
1.02.12.1.02.12.0101.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Input (masukan)						
	Air dan Listrik	Dana	Rp	5.000.000	42.627.294	78	Sesuai Kebutuhan	
		2 Out Put (keluaran)						
		Terselenggaranya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rek.Kantor	41	41	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, dan Listrik	Rek.Kantor	41	41	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.0101.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Input (masukan)						
	Perlengkapan Kantor	Dana	Rp	70.000.000	169.822.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Mobil dinas Kepala SKPD	MB	24	24	100		
		3 Out Come (Hasil)						
		Tersedianya mobil dinas SKPD	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0101.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	1 Input (masukan)						
	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana	Rp	5.200.000	3.411.900	66	Sesuai Kebutuhan	
		2 Out Put (keluaran)						
		Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	17	17	100		

		3	Out Come (Hasil)						
			Tersedianya Surat-Surat Kelengkapan Kend. Dinas yg legal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								89	
1.02.12.1.02.12.0101.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	217.725.000	216.886.200	100		
		2	Out Put (keluaran)						
			Tersusunnya laporan keuangan dan realisasi anggaran	Laporan	12	12	100		
		3	Out Come (Hasil)						
			Tertindakannya pengelolaan keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100	
1.02.12.1.02.12.0101.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	98.500.000	98.480.730	100		
		2	Out Put (keluaran)						
			Alat kebersihan	jenis	28	28	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Terpeliharanya kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100	
1.02.12.1.02.12.0101.010	Alat Tulis Kantor	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	224.992.000	222.551.525	99		
		2	Out Put (keluaran)						
			Alat Tulis Kantor	jenis	50	50	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100	
1.02.12.1.02.12.0101.011	Penyediaan Barang Cetak dan	1	Input (masukan)						
	Penggandaan		Dana	Rp	18.200.000	14.172.131	78	Sesuai Kebutuhsn	
		2	Out Put (keluaran)						
			Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	jenis	8	8	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		

TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.0101.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	5.746.350	5.738.260	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Komponen listrik / bahan penerangan	komponen	8	8	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Adanya kondisi kerja yang memadai	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0101.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	369.075.000	357.318.900	97		
		2 Out Put (keluaran)						
		Peralatan dan perlengkapan kantor	unit	70	70	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.0101.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	6.000.000	5.940.000	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Bahan bacaan	jenis	36	36	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya bahan bacaan	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0101.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	17.200.000	17.095.510	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Bahan minuman dan snack	jenis	6	6	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0101.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	175.913.650	174.989.914	99		

		2	Out Put (keluaran)						
			Rapat	OH	2	2	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Tertindakannya rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100	
1.02.12.1.02.12.0102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Input (masukan)					DED Gagal Lelang	Sudah Bersurat ke BKD dan Bappeda agar dimunculkan pada tahun 2018
	<i>Kegiatan:</i>		Dana	Rp	108.000.000	-	-		
1.02.12.1.02.12.0102.003	Pembangunan Gedung kantor	2	Out Put (keluaran)						
			Gedung Kantor	unit	1	-	-		
		3	Out Come (hasil)						
			Tersedianya sarana mobilitas	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								33	
1.02.12.1.02.12.0102.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	67.500.000	63.751.500	94		
		2	Out Put (keluaran)						
			Sepeda motor	unit	3	3	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Tersedianya sarana mobilitas	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								98	
1.02.12.1.02.12.0102.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	76.000.000	73.934.420	97		
		2	Out Put (keluaran)						
			Sarana Upacara	jenis	8	8	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Terselenggaranya persembahyangan	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								99	
1.02.12.1.02.12.0102.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Input (masukan)						
			Dana	Rp	58.000.000	55.430.720	96		
		2	Out Put (keluaran)						
			Pemeliharaan kendaraan dinas (di luar kend.sewa)	unit	13	13	100		
		3	Out Come (hasil)						
			Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								99	

1.02.12.1.02.12.0102.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	1	Input (masukan)					
	Gedung Kantor		Dana	Rp	6.125.000	5.549.970	91	
		2	Out Put (keluaran)					
			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit	6	6	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								97
1.02.12.1.02.12.0102.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	1	Input (masukan)					
	Gedung Kantor		Dana	Rp	10.000.000	7.524.000	75	
		2	Out Put (keluaran)					
			Pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	10	10	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Terpeliharanya kondisi peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								92
1.02.12.1.02.12.0102.042	Rehabilitasi sedang/berat rumah	1	Input (masukan)					
	Gedung Kantor		Dana	Rp	208.000.000	203.316.000	98	
		2	Out Put (keluaran)					
			Terterselenggaranya rehab rumah gedung kantor	unit	1	1	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Meningkatnya gedung kantor yang layak pakai	Bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								99
1.02.12.1.02.12.0102.048	Penataan Halaman	1	Input (masukan)					
	Gedung/Lingkungan Kantor		Dana	Rp	100.000.000	99.000.000	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Terselenggaranya Penataan halaman gedung kantor	paket	1	1	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Terwujudnya keasrian halaman gedung kantor	Bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100
1.02.12.1.02.12.0103.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Input (masukan)					
	<i>Kegiatan:</i>		Dana	Rp	7.700.000	7.700.000	100	
1.02.12.1.02.12.0103.001	Pengadaan mesin/kartu absensi	2	Out Put (keluaran)					

		Mesin absensi	unit	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya disiplin pegawai	unit	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0103.005	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari	1 Input (masukan)						
	tertentu	Dana	Rp	17.000.000	16.998.300	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Pakaian endek	potong	34	34	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya pakaian endek khusus hari-hari tertentu	potong	34	34	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0103.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	64.125.000	64.125.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya mobilitas darat	kali	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Lancarnya pelaksanaan tirta yatra	kali	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0105.	Program Peningkatan Kapasitas	1 Input (masukan)						
	Sumber Daya Aparatur	Dana	Rp	10.000.000	10.000.000	100		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0105.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Bimbingan teknis	orang/tahun	2	2	100		
	perundang-undangan	3 Out Come (hasil)						
		Peningkatan SDM	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0106.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	1 Input (masukan)						
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dana	Rp	57.000.000	56.010.700	98		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0106.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan-laporan	laporan	5	5	100		
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya laporan kinerja	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		

1.02.12.1.02.12.0106.004	Penyusunan pelaporan keuangan	1	Input (masukan)					
	akhir tahun		Dana	Rp	37.990.000	37.939.400	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Laporan keuangan	laporan	1	1	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Tersedianya laporan keuangan	bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100
1.02.12.1.02.12.0107.	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	1	Input (masukan)					
	<i>Kegiatan:</i>		Dana	Rp	100.000.000	99.682.710	100	
1.02.12.1.02.12.0107.001	Penyusunan Anggaran SKPD	2	Out Put (keluaran)					
			RKA/DPA & RDPPA/DPPA	dok	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Tersedianya dokumen anggaran SKPD	dok	4	4	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100
1.02.12.1.02.12.0108.	<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>	1	Input (masukan)					
	<i>Kegiatan:</i>		Dana	Rp	20.000.000	19.995.410	100	
1.02.12.1.02.12.0108.001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai	2	Out Put (keluaran)					
	Pembangunan		Tertindakannya buleleng festival	kali	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Tertindakannya pawai pembangunan	Bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								100
1.02.12.1.02.12.0115.	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>	1	Input (masukan)					
	<i>Kegiatan:</i>		Dana	Rp	87.500.000	86.940.118	99	
1.02.12.1.02.12.0115.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama	2	Out Put (keluaran)					
	strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah		Tertindakannya matcmaking antara usaha besar dengan usha kecil menengah	kali	1	4	400	
		3	Out Come (hasil)					
			Terwujudnya kerjasama investasi usaha besar dengan usaha kecil menengah	bulan	12	12	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								200
1.02.12.1.02.12.0115.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	200.700.000	188.253.550	94	

		2 Out Put (keluaran)						
		Terselenggaranya promosi penanaman modal	kali	4	7	175		
		3 Out Come (hasil)						
		Dikenalkannya potensi dan peluang investasi di Kab. Buleleng	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						123		
1.02.12.1.02.12.0115.014	Penyusunan sarana prasarana promosi	1 Input (masukan)						
	penanaman modal	Dana	Rp	121.260.000	121.176.590	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	paket	2	7	350		
		3 Out Come (hasil)						
		Lancarnya pelaksanaan promosi Penanaman Modal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						183		
1.02.12.1.02.12.0115.018	Penyusunan strategi promosi	1 Input (masukan)						
	penanaman modal	Dana	Rp	105.740.000	105.491.335	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersusunnya dokumen strategis promosi penanaman modal	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terarahnya pelaksanaan promosi penanaman modal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0116.	Program Peningkatan Iklim Investasi	1 Input (masukan)						
	dan Realisasi Investasi	Dana	Rp	67.600.000	65.345.750	97		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0116.005	Penyusunan sistem informasi penanaman	Tersusunnya database/sistem informasi penanaman modal	dok	1	1	100		
	modal di daerah	3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.0116.007	Kajian kebijakan penanaman modal	1 Input (masukan)						

		Dana	Rp	166.100.000	164.320.856	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tertindakannya sosialisasi regulasi PM ,tersusunnya dok.kajian kebijakan PM	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0116.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	95.900.000	91.429.650	95		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tertindakannya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PM	investor	100	100	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terkendalinya pelaksanaan PM	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						98		
1.02.12.1.02.12.0116.012	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	47.520.000	46.397.000	98		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tertindakannya Pembinaan penanaman modal	pengusaha	50	50	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.0116.013	Penyusunan perencanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	254.000.000	250.970.650	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Laporan koordinasi/data titik reklama/terarahnya rencana PM	dok/sistem	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data historis perijinan	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.0116.014	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	52.200.000	50.123.600	96		
		2 Out Put (keluaran)						

		Terselesaikannya permasalahan/kasus PM	%	100	100	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN							99	
1.02.12.1.02.12.0117.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya	1 Input (masukan)						
	Sarana dan Prasarana Daerah	Dana	Rp	107.000.000	104.588.462	98		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0117.001	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Terpetakannya potensi investasi di Kab. Buleleng	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data potensi investasi di Kab.Buleleng	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN							99	
1.02.12.1.02.12.0118.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	50.000.000	48.456.580	97		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.0118.004	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	Data pelayanan perijinan	buku	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya Data pelayanan perijinan	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN							99	
1.02.12.1.02.12.0118.006	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	141.800.000	137.714.620	97		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	kec	9	9	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya pengetahuan calon pemohon perijinan	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN							99	
1.02.12.1.02.12.0118.007	Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	60.000.000	56.330.750	94		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersusunnya dok. Indeks kepuasan masyarakat	dok.	2	2	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Teridentifikasinya Indeks kepuasan masyarakat	responden	100	100	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN							98	

1.02.12.1.02.12.0118.010	Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat bidang A urusan perumahan dan lingkungan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	338.000.000	334.377.974	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah berkas permohonan perijinan perumahan dan lingkungan yg diverifikasi dan diteliti	ijin	3000	3.636	121		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data valid sbg bahan penetapan/penerbitan ijin perumahan dan lingkungan	ijin	3000	3.636	121		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						114		
1.02.12.1.02.12.0118.011	Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat bidang B Pariwisata dan badan usaha	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	274.500.000	271.902.400	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah berkas permohonan perijinan pariwisata dan badan usaha yg diverifikasi dan diteliti	ijin	3000	2.951	98		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data valid sbg bahan penetapan/penerbitan ijin pariwisata dan badan usaha	ijin	3000	2.951	98		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN				4.520.812.000	4.313.131.379	99		

Singaraja, 29 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Putu Karuna, SH**

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011

### REKAP PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.02.12.1.02.12.0101.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
1.02.12.1.02.12.0101.001	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>BHP Prov Pajak Rokok,DAU</i>	40.000.000	39.319.000	98	380	100	193
1.02.12.1.02.12.0101.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>BHP Prov BBNKB,DAU</i>	55.000.000	42.627.294	78	100	100	93
1.02.12.1.02.12.0101.003	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	<i>DAU</i>	170.000.000	169.822.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	<i>DAU</i>	5.200.000	3.411.900	66	100	100	89
1.02.12.1.02.12.0101.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	<i>DAU</i>	217.725.000	216.886.200	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<i>DAU</i>	98.500.000	98.480.730	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<i>BPH Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	224.992.000	222.551.525	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>DAU</i>	18.200.000	14.172.131	78	100	100	93
1.02.12.1.02.12.0101.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>DAU</i>	5.746.350	5.738.260	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>DBH PPH, DAU</i>	369.075.000	357.318.900	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0101.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>DAU</i>	6.000.000	5.940.000	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.017	Penyediaan makanan dan minuman	<i>DAU</i>	17.200.000	17.095.510	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0101.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah	<i>BHP Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	175.913.650	174.989.914	99	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0102.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
1.02.12.1.02.12.0102.003	Pembangunan Gedung Kantor	<i>BHP Prov Pajak rokok</i>	108.000.000	-	-	-	100	33
1.02.12.1.02.12.0102.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	<i>DBH PPH</i>	67.500.000	63.751.500	94	100	100	98
1.02.12.1.02.12.0102.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	<i>DBH PPH</i>	76.000.000	73.934.420	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0102.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	<i>DBH PPH,BHP Prov Pajak rokok</i>	58.000.000	55.430.720	96	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0102.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	<i>DBH PPH</i>	6.125.000	5.549.970	91	100	100	97
1.02.12.1.02.12.0102.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	<i>DBH PPH</i>	10.000.000	7.524.000	75	100	100	92

1.02.12.1.02.12.0102.042	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	DAU	208.000.000	203.316.000	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0102.048	Penataan halaman gedung/lingkungan kantor	DBH PPH, DAU	100.000.000	99.000.000	99	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0103.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							
1.02.12.1.02.12.0103.001	Pengadaan mesin/kartu absensi	DBH PPH	7.700.000	7.700.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0103.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DBH PPH	17.000.000	16.998.300	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0103.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	DBH PPH	64.125.000	64.125.000	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0105.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>							
	<b>capaian kinerja dan Keuangan</b>							
1.02.12.1.02.12.0105.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DBH PPH	10.000.000	10.000.000	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0106.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja</b>							
	<b>dan Keuangan</b>							
1.02.12.1.02.12.0106.001	Penyusunan laporan kinerja dan ihtktisar realisasi kinerja SKPD	DBH PPH, BHP Prov Pajak rokok,DAU	57.000.000	56.010.700	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0106.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DBH PPH, DAU	37.990.000	37.939.400	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0107.</b>	<b>Program perencanaan anggaran SKPD</b>							
1.02.12.1.02.12.0107.001	Penyusunan anggaran SKPD	DBH PPH, BHP Prov Pajak rokok, DAU	100.000.000	99.682.710	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0108.</b>	<b>Program informasi pembangunan daerah</b>							
1.02.12.1.02.12.0108.001	Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan	DBH PPH,BHP Prov BBKB	20.000.000	19.995.410	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0115.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>							
1.02.12.1.02.12.0115.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar	DBH PPH,BHP Prov Pajak rokok,DAU	87.500.000	86.940.118	99	400	100	200
	dan usaha kecil menengah							
1.02.12.1.02.12.0115.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	DBH PPH, BHP Prov BBKB, BHP Prov Pajak rokok,DAU	200.700.000	188.253.550	94	175	100	123

1.02.12.1.02.12.0115.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB, BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	121.260.000	121.176.590	100	350	100	183
1.02.12.1.02.12.0115.018	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB, BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	105.740.000	105.491.335	100	100	100	100
<b>1.02.12.1.02.12.0116.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Informasi</b>							
1.02.12.1.02.12.0116.005	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	<i>DBH PPH, BHP Prov BBNKB, BHP Prov BBKB,DAU</i>	67.600.000	65.345.750	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0116.007	kajian kebijakan penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	166.100.000	164.320.856	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0116.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	95.900.000	91.429.650	95	100	100	98
1.02.12.1.02.12.0116.012	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	47.520.000	46.397.000	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0116.013	Penyusunan perencanaan penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB,BHP Prov BBNKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	254.000.000	250.970.650	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0116.014	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	<i>DBH PPH, BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	52.200.000	50.123.600	96	100	100	99
<b>1.02.12.1.02.12.0117.</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>							
1.02.12.1.02.12.0117.001	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	107.000.000	104.588.462	98	100	100	99
<b>1.02.12.1.02.12.0118.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu</b>							
1.02.12.1.02.12.0118.004	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	<i>DBH PPH,BHP Prov BBKB, DAU</i>	50.000.000	48.456.580	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0118.006	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB,BHP Prov Pajak rokok,DAU</i>	141.800.000	137.714.620	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.0118.007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	<i>DBH PPH,BHP Prov BBKB, DAU</i>	60.000.000	56.330.750	94	100	100	98

1.02.12.1.02.12.0118.010	Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat bidang A urusan perumahan dan lingkungan	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB, BHP Prov BBNKB, BHP Prov Pajak rokok, DAU</i>	338.000.000	334.377.974	99	121	121	114
1.02.12.1.02.12.0118.011	Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat bidang B pariwisata dan bidang usaha	<i>DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU</i>	274.500.000	271.902.400	99	98	98	99
<b>TOTAL</b>			<b>4.520.812.000</b>	<b>4.313.131.379</b>	<b>95.40</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>104</b>

Singaraja, 29 Desember 2017  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Putu Karuna, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19660602 199403 1 011